

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DALAM TEORI KONFLIK**SUMARTONO**

Dosen FISIPOL Universitas Ekasakti

email : rajoameh1999@yahoo.com

ABSTRACT

Social change in general can be defined as a process of shifting or changing the structure/order in the society, include more innovative mindset, attitude, and social life in order to get a more dignified livelihood. The changes that occur in the community nowadays is normal symptoms. His influence could spread quickly to other parts of the world thanks to the presence of modern communication. New discoveries in the field of technology happens somewhere, it quickly can be known by other societies that are far away from the venue. Social change always brings out the dynamics that unwittingly connected with the reality of conflicts in society. This is due to social changes and social conflict is always attached to the structure of society. Quoting what was prudent Soerjono Soekanto that social change in society can change social values giving rise to difference the establishment or result in the appearance of a conflict. In view of the conflict theory states that something is constant or fixed is social conflict, rather than social change. Because the change is simply a result of the conflict. Because of the sustained conflict, then the change will also follow suit.

Keyword : *dynamics, social change, conflict theory*

ABSTRAK

Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjangar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut. Perubahan sosial senantiasa memunculkan dinamika yang tanpa disadari berhubungan dengan realitas konflik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perubahan sosial dan konflik sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Mengutip apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial dalam masyarakat dapat mengubah nilai sosial sehingga menimbulkan perbedaan pendirian atau mengakibatkan munculnya konflik. Dalam pandangan teori konflik dinyatakan bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya.

Kata kunci : dinamika, perubahan sosial, teori konflik

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus menerus, ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan.

Realitas menunjukkan perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Terkadang, ada masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan. Juga terdapat adanya perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh luas maupun terbatas. Di samping itu ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya lambat, dan perubahan yang berlangsung dengan cepat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat juga dapat terjadi pada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Menurut Rakhmat (dalam Harun, 2011 : 283) perubahan sosial yang bersifat menyeluruh hanya akan terjadi melalui konflik. Tanpa terjadi konflik, tidak akan ada transformasi sosial yang bersifat menyeluruh.

B. PEMAHAMAN TENTANG PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soemardjan, 1974 : 23).

Rogers dan Shoemaker (dalam Hanafi 1986 : 16-17) mendefinisikan perubahan sosial sebagai proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Revolusi nasional, pembentukan suatu lembaga pembangunan desa, pengadopsian metode keluarga berencana oleh suatu keluarga, merupakan contoh-contoh perubahan sosial. Perubahan, baik pada fungsi maupun struktur sosial adalah terjadi sebagai akibat dari berbagai status individu dan status kelompok yang teratur. Berfungsinya status itu merupakan seperangkat peranan atau perilaku nyata seseorang dalam status tertentu. Status dan peranan saling memengaruhi satu sama lain.

Berkaitan dengan pemahaman perubahan sosial ini, beberapa sosiolog memberikan definisi perubahan sosial (Hooguelt, 1995 : 56) yang dapat membantu kita untuk lebih mudah memahami apa sebenarnya perubahan sosial tersebut :

1. William F.Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
2. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
3. MacIver mengatakan perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
4. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.
5. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.

Berdasarkan lima pengertian yang diberikan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan

yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, dan sistem hubungan sosial.

C. TEORI KONFLIK

Conflict is the basic of life. Demikian ungkapan untuk menggambarkan fenomena konflik sebagai fakta dasar dalam kehidupan. Manusia di manapun berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia di muka bumi, konflik merupakan warna lain kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Darwinisme bahkan sudah lama melihat fenomena konflik dalam kehidupan bersama sebagai *struggle* dan *survival of the fittest* (Veeger, 1993: 210). Prinsip ini berarti dalam kehidupan manusia selalu terjadi perjuangan untuk kelangsungan hidupnya, yang menyebabkan terjadinya konflik.

Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok (Garna, 1996: 65). Akan tetapi hanya relasi-relasi pertentangan objektif dan struktural yang menjadi fokus perhatian analisis sosiologi konflik. Sedangkan perasaan subyektif seperti amarah, kebencian, antipati, keinginan akan balas dendam, dan sebagainya, bukan relasi pertentangan yang objektif dan struktural, sehingga tidak menjadi perhatian analisis teori konflik. Sebagai contoh, orang dapat bersahabat satu dengan yang lain, kendatipun ada perkara objektif yang memisahkan mereka. Sebaliknya, orang juga saling memusuhi, kendatipun tidak ada dasar objektif yang memisahkan mereka (Veeger, 1993: 212).

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi

juga keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Karena itu harus dicari penyebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya (Garna, 1996: 66).

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional.

Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consciousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka.

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik, yakni :

1. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.

2. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.
3. Teori konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.
5. Teori konflik mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

Selanjutnya, menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi.

Konflik juga berkaitan dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, Collins menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi dengan intentitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilitasi. Konflik yang dilihat dari stratifikasi sosial adalah operasi lewat struktur dan intensitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok-kelompok mengorganisasi dan memobilitasi dengan penguasaan sumber daya.

Konflik juga berkaitan dengan organisasi yang dijadikan arena konflik, menurut Collins, konflik yang terjadi di organisasi baik organisasi politik maupun organisasi kerja lebih ditekankan pada manuver merusak ikatan organisasional dibandingkan merusak dalam artian fisik. Dalam teori konflik Collins lebih memperlihatkan konflik yang mempengaruhi solidaritas sosial, sosial ideal, sentiment moral, dan altruisme sebab distribusi dari kondisi material dan organisasi menghasilkan cita-cita dan perasaan-perasaan yang dapat mendominasi hierarki atau kelompok. Konflik juga melahirkan konflik-konflik berikutnya, konflik potensial dihidupkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki beberapa pengertian kesadaran moral. Dalam teori konflik Collins juga membagi tipologi konflik menjadi 2 yaitu bentuk konflik yang cenderung terus dalam periode yang lebih panjang dibandingkan konflik yang hebat, bentuk selanjutnya adalah konflik yang relative ringan cenderung mengurangi kehebatan birokratisasi. Dalam hal terjadinya konflik yang hebat lebih menekankan pada sumber daya emosi dalam waktu jangka pendek sedangkan dalam jangka panjang lebih memerlukan faktor-faktor sumber daya material.

D. PERUBAHAN SOSIAL DALAM TEORI KONFLIK

Kaum struktural fungsionalisme menganggap bahwa disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan sosial mengakibatkan perubahan masyarakat dalam bentuk tumbuhnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks. Hal ini terjadi sebagai akibat daripada pengaruh faktor-faktor dari luar (eksternal). Menurut David Lockwood (dalam Nasikun, 1992: 14), anggapan semacam ini mengabaikan kenyataan-kenyataan berikut:

1. Setiap struktur sosial di dalamnya mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial.
2. Reaksi dari sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra-systemic change*) tidak selalu bersifat *adjustive* (penyesuaian).
3. Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *visious circle*.

4. Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Oleh karena mengabaikan kenyataan tersebut, maka pendekatan fungsionalisme struktural dianggap bersifat reaksioner dan kurang mampu menganalisis masalah perubahan sosial. Pendekatan ini juga dianggap tidak saja mengabaikan konflik dan kontradiksi intern sebagai sumber terjadinya perubahan kemasyarakatan, akan tetapi juga kurang memperhatikan kenyataan bahwa suatu sistem sosial tidak selalu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang datang dari luar.

Sistem sosial memang seringkali mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan dari luar tanpa mengalami disintegrasi sosial, tetapi sebaliknya, suatu sistem sosial dapat juga menolak perubahan dari luar baik dengan memelihara *status quo* maupun dengan cara melakukan perubahan yang bersifat reaksioner. Keadaan ini dapat mengakibatkan bagian atau unsur tertentu dari sistem sosial menjadi disfungsional akibat timbulnya ketegangan sosial. Apabila faktor eksternal cukup kuat mempengaruhi bagian tersebut tanpa diikuti penyesuaian unsur lain, maka disfungsi dan ketegangan akan berkembang menjadi perubahan sosial yang bersifat revolusioner. Sisi ini kurang mendapat tempat dalam kajian struktural fungsionalisme.

Apa yang kurang diperhatikan oleh para penganut struktural fungsionalisme sebagaimana yang telah dipaparkan justru menjadi pusat perhatian penganut teori konflik dalam menganalisis perubahan sosial yang bersumber dari dalam sistem sosial itu sendiri. Menurut Ralf Dahrendorf, tokoh utama teori konflik dari kalangan *Structuralist Non-Marxis*, berbeda dari fungsionalisme struktural, pandangan teori konflik berpangkal pada anggapan dasar berikut (dalam Nasikun, 1992: 16-17; lihat juga Veeger, 1993: 213-214; dan Johnson, 1990: 194) :

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.

2. Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik adalah gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Coser membagi konflik menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan- tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan- tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasiran dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Menurut Coser terdapat suatu kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Contoh, dua pengacara yang selama masih menjadi mahasiswa berteman erat. Kemudian setelah lulus dan menjadi pengacara dihadapkan pada suatu masalah yang menuntut mereka untuk saling berhadapan di meja hijau. Masing- masing secara agresif dan teliti melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meniggalkan persidangan mereka melupakan perbedaan dan pergi ke restoran untuk membicarakan masa lalu.

Akan tetapi apabila konflik berkembang dalam hubungan- hubungan yang intim, maka pemisahan (antara konflik realistis dan non-realistis) akan lebih sulit untuk dipertahankan. Coser menyatakan bahwa, semakin dekat suatu

hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan- hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan- hubungan primer dimana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar-benar melampaui batas sehingga menyebabkan ledakan yang membahayakan hubungan tersebut. Contoh, konflik antara suami dan istri, serta konflik sepasang kekasih.

Menurut Coser (dalam Garna, 1992: 66; lihat juga Veeger, 1993: 212), bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik *in-group* merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

Suatu perubahan sosial selalu terwujud dalam bentuk adanya kekacauan dalam kehidupan sosial, tetapi tidak semua perubahan ini mewujudkan kekacauan sosial yang besar. Yang terbanyak adalah adanya kekacauan dalam ruang-ruang lingkup kehidupan sosial kecil dan yang biasanya terjadi di mulai dalam kehidupan keluarga. Kekacauan sosial dapat mengakibatkan adanya konflik-konflik sosial, tetapi suatu konflik sosial tidak dapat berlangsung terus menerus, maka pada suatu saat kedamaian terwujud dan suatu ketertiban sosial baru menjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha mengatasi konflik biasanya juga berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, yaitu sejumlah warga masyarakat yang menyadari kerugian-kerugian dari adanya konflik, tetapi bisa juga oleh adanya kekuatan yang berasal dari luar masyarakat tersebut (Ranjabar, 2015 : 11).

Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi juga keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak. Karena itu harus dicari penyebab konflik tetapi juga bagaimana cara mengatasinya (Garna, 1996: 66).

Konflik menjadi tidak lumrah dan sumber malapetaka dan kehancuran kehidupan masyarakat ketika disertai dengan tindakan anarkis dan kebrutalan. Seperti yang terjadi di akhir pemerintahan Orde Baru dan di awal masa reformasi. Ketika itu konflik sering terjadi dan eskalasinya meluas menjadi kerusuhan sosial di berbagai daerah: Ambon, Aceh, Sampit, Poso, dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini kalau dicermati pemberitaan melalui media massa, tampilan kekerasan konflik massa dari waktu ke waktu semakin beraneka ragam dan gaya. Inilah sisi buruk dari konflik yang menuntut perlunya strategi untuk mengatasinya sehingga menjadi kekuatan perubahan masyarakat.

E. DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL

Di dalam perkembangan sosiologi yang mutakhir, karena pengaruh dari fungsionalisme, perubahan sosial agak diabaikan atau dianggap sebagai suatu peristiwa eksepsional. Tekanan diletakkan pada stabilitas sistem-sistem sosial dan sistem-sistem nilai serta kepercayaan, maupun terhadap consensus (daripada perbedaan pendapat dan konflik) dalam setiap masyarakat. Akan tetapi kiranya jelas, bahwa semua masyarakat mempunyai aspek-aspek kontinuitas dan perubahan, dan salah satu tugas utama dari analisis sosiologis adalah untuk mengungkapkan bagaimana kontinuitas dan perubahan saling berkaitan. Adanya kontinuitas dipertahankan dan dipelihara oleh pengendalian sosial (yang tidak mustahil berwujud sebagai paksaan) dan juga oleh pendidikan yang meneruskan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Di samping itu, maka terdapat kondisi-

kondisi yang mendorong terjadinya perubahan, misalnya, pertumbuhan pengetahuan serta konflik yang menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan-perubahan sosial (Ranjabar, 2015 :68-69).

Sebagai salah satu faktor dalam perubahan sosial, maka konflik sosial dapat ditelaah dari berbagai aspek, sebagai berikut :

1. Secara historis maka konflik antara masyarakat-masyarakat memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan unit-unit sosial yang lebih besar dan lebih luas, memperkuat sistem stratifikasi sosial dan memperluas difusi penemuan-penemuan baru di bidang sosial budaya. Di zaman sekarang konflik internasional telah mempengaruhi struktur ekonomi dan politik, maupun norma-norma, walaupun perhatian terhadap masalah-masalah itu tidak banyak.
2. Konflik antargolongan mungkin mendorong terjadinya perubahan dan penemuan-penemuan baru.
3. Adanya atau kemungkinan terjadinya konflik antar generasi (Soekanto, 1983 : 27).

Lalu, apa sesungguhnya dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat? Adanya suatu perubahan sosial dalam masyarakat akibat konflik sosial bergantung pada keadaan masyarakat itu sendiri yang mengalami perubahan sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya suatu kemajuan (progress). Bahkan, dapat pula sebagai suatu kemunduran masyarakat.

Kecepatan perubahan tiap daerah berbeda-beda bergantung pada dukungan dan kesiapan masyarakat untuk berubah. Perbedaan perubahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial, yang tentunya hal ini harus dihindari..

Terdapat beberapa tanggapan masyarakat sebagai dampak perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, penyimpangan masyarakat, ketertinggalan, atau ketidaktahuan adanya perubahan, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan yang diterima masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini karena setiap orang memiliki gagasan mengenai perubahan

yang mereka anggap baik sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-macam, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki.

2. Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang atau menghilang sehingga perubahan dianggapnya akan mengancam berbagai aspek kehidupan. Untuk mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan ditentang karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu.
3. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan. Perubahan juga dianggap membawa nilai-nilai baru yang modern.
4. Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan seseorang ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia.
5. Masa bodoh terhadap perubahan. Hal itu disebabkan perubahan sosial yang terjadi dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya.
6. Ketidaksiapan menghadapi perubahan. Pengetahuan dan kemampuan seseorang terbatas, dampak perubahan sosial yang terjadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Selain itu, perubahan sosial juga mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kejahatan, kenakalan remaja, atau penyakit sosial lainnya. Menurut Merton (dalam Soekanto, 1983 : 31), suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial.
2. Semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial bersumber secara langsung pada kondisi-kondisi ataupun proses-proses sosial. Pendapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok di sini bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut (baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial yang menyebabkan terjadinya masalah sosial).
3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, urutannya sangat relatif.

4. Adanya masalah-masalah sosial yang terbuka dan masalah-masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat karena tidak sesuainya tindakan-tindakan dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku.

Masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu berakibat terjadi disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial.

Proses disintegrasi sebagai akibat atau dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk antara lain sebagai berikut:

1. Pergolakan dan Pemberontakan

Proklamasi dikumandangkan sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia dapat diterima di berbagai daerah walaupun tidak secara bersamaan. Rakyat menyambut dan mendukungnya. Oleh karena itu, segera dibentuk suatu tatanan dan kehidupan sosial baru. Rangkaian peristiwa itu disebut revolusi. Adanya pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah pascakemerdekaan, bertujuan untuk menjatuhkan kedudukan penguasa pada saat itu, sekaligus menyatakan kelidaksetujuan mereka terhadap ideologi pemerintah.

2. Aksi Protes dan Demonstrasi

Aksi protes disebut juga unjuk rasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda. Protes dapat terjadi apabila suatu hal menimpa kepentingan individu atau kelompok secara langsung sebagai akibat dari rasa ketidakadilan akan hak yang harus diterima. Akibatnya, individu atau kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan penyelesaian.

3. Kriminalitas

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi peluang bagi setiap orang untuk berubah, tetapi perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. Hal ini berakibat terjadinya perbedaan sosial berdasarkan kekayaan, pengetahuan, perilaku, ataupun pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang karena dipengaruhi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau terpuaskan dalam kehidupannya.

4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Bangsa Indonesia yang sedang membangun perlu memiliki sistem administrasi yang bersih dan berwibawa, bebas dari segala korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah korupsi menyangkut berbagai aspek sosial dan budaya maka Bung Hatta (dalam Mubyarto) mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya. Apabila hal ini sudah membudaya di kalangan bangsa Indonesia atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa akan sulit untuk diberantas. Akibatnya, hal tersebut akan menghambat proses pembangunan nasional. Untuk memberantas korupsi, tidak hanya satu atau beberapa lembaga pemerintahan saja yang harus berperan, tetapi seluruh rakyat Indonesia harus bertekad untuk menghilangkan korupsi.

5. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan disintegrasikan dari keutuhan suatu masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kenakalan remaja disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejala kehidupan yang disebabkan adanya perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan pendidikan keluarga menjadi berkurang.

Selanjutnya, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disintegrasi. Realitas ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya

perubahan sosial mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Dampak positif yang mengiringinya tentu menjadi harapan masyarakat. Tetapi yang mesti dipahami masyarakat adalah bagaimana mengantisipasi perubahan sosial yang menimbulkan konflik sosial.

REFERENSI

- Abdulsyani. 1992. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Bernard, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad.
- Hanafi, Abdilah. 1984. *Memahami Komunikasi Antar Manusia*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto, 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hooguelts, Ankle MM. 1995. *Sosiologi Sedang Berkembang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johnson, Doyle Paul. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 2 (cetakan kedua). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1 (cetakan ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lewis Coser , 1956. *The Function of Social Conflict*, New York: Free Press.
- Margaret. M. Poloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial*, Bandung : Alfabeta.

- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, Selo dan Soeleman Soemardi, 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surata, Agus dan Tuhana Taufik Andrianto, 2001. *Atasi Konflik Etnis*. Jogjakarta: Global Pustaka Utama.
- Veegers, K.J. 1993. *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.